

INSTITUSI PENDIDIKAN: MAINSTREAM TRANSFORMASI KEBUDAYAAN
(*Education Institution: Mainstream Cultural Transformation*)

Oleh:

Wardah Hanafie Das
Universitas Muhammadiyah Parepare

Abstract

Education as a community need in maintaining and developing culture. Culture is the product of creativity, taste, and community initiative that can be more productive and accelerative if it is developed through educational institutions, in the form of schools. Schools as formal education centers have systemic rules, are well managed, and are managed professionally. Schools have the functions of simultaneous reproduction, awareness, and mediation. Schools as social institutions function as socialization institutions, to transmit and transform culture, and select students to continue higher education. The school as a cultural center is a set of values that underlies the attitudes, traditions, daily habits, and symbols practiced by principals, teachers, administrative officers, students, and the community around the school. The values of education in schools can be realized through intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, social intelligence, and vocational intelligence.

Keywords: *educational institutions, schools, transformation, culture.*

Pendidikan sebagai kebutuhan masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan. Budaya merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat dapat lebih produktif dan akseleratif jika dikembangkan melalui insititusi pendidikan, berupa sekolah. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal memiliki aturan yang sistemik, termenej dengan baik, dan dikelola secara profesional. Sekolah memiliki fungsi sebagai reproduksi, penyadaran, dan mediasi secara simultan. Sekolah sebagai institusi sosial berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, untuk mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan, dan menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah sebagai pusat kebudayaan merupakan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Nilai-nilai pendidikan di sekolah dapat terwujud melalui dengan pencerdasan intelektual, pencerdasan emosional, pencerdasan spiritual, pencerdasan social, dan pencerdasan vokasional. Kata kunci: institusi pendidikan, sekolah, transformasi, kebudayaan.

PENDAHULUAN

Akselerasi sains dan teknologi berimplikasi pada perkembangan moral dan budaya kompleks. Ketika terlepas dari bingkai pendidikan, teknologi dan industri otomotif memberikan keleluasaan terhadap perkembangan moral keserakahan. Secara alami, moral tersebut berpengaruh langsung terhadap perluasan ekonomi kapitalistik, kekuasaan politik otoriter, dan ketidakadilan hukum. Persoalannya adalah semua jenis moralitas tersebut cenderung *merusak*,

sedangkan pendidikan cenderung *menumbuhkan*, dan teknologi sendiri bisa dimanfaatkan oleh manusia secara fleksibel.¹ Di sinilah dibutuhkan kesadaran moral dan intelektual dalam menyikapi trend kehidupan kontemporer.

¹Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan*, (Cet. IV; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009), h. 27. HALIK, Abdul, et al. Paradigm of Islamic Education in the Future: The Integration of Islamic Boarding School and Favorite School. *Information Management and Business Review*, 2016, 8.4: 24-32.

Fenomena global tersebut menjadi tantangan bagi pendidikan dalam pencapaian visi dan misinya. Pendidikan berperan dalam mengembangkan potensi manusia dan sekaligus *menback-up* agar tetap eksis survival dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di alam profan. Secara umum, pendidikan memiliki tugas yaitu sebagai berikut: (1) Pendidikan dipandang sebagai pengembangan potensi; (2) Pendidikan dipandang sebagai pewarisan budaya; (3) Pendidikan dipandang sebagai interaksi antara budaya dengan potensi.²

Pendidikan menjadi *mainstream* pengembangan potensi dan budaya. Potensi dapat berkembang dan tersalurkan melalui kegiatan pendidikan, dan begitu juga budaya dapat lestari dan maju melalui kegiatan pendidikan. Dalam kegiatan pendidikan, dicirikan oleh lingkungan yang melaksanakannya yaitu: pendidikan formal (sekolah), pendidikan informal (keluarga), dan pendidikan nonformal (masyarakat).³ Ketiga lingkungan pendidikan tersebut saling berinteraksi dan menguatkan dalam pengembangan potensi peserta didik dan pelestarian budaya.

Pendidikan formal yang biasa disebut sekolah memiliki sistem yang terencana, terorganisir, terukur, dan berjenjang. Pendidikan formal dalam bentuk persekolahan memiliki ciri-ciri menurut Faisal, yakni sebagai berikut:

Terstandardisasi legalitas formal, jenjang, lama belajar, paket kurikulum, persyaratan pengelolaan, persyaratan usia dan tingkat

pengetahuan peserta didik, perolehan dan keberartian ijazah, prosedur evaluasi belajar, sekuensi penyajian materi dan latihan, persyaratan presensi, waktu liburan, dan sumbangan pendidikan.⁴

Pendidikan di sekolah kontemporer tampak sebagai wadah kegiatan pendidikan yang dilakukan secara formalis-simbolis, ukuran-ukuran keberhasilan terletak pada domain intelektual dan vokasional, kegiatan pendidikan yang cenderung terkomersialisasi, terjebak ke dalam 'budak' politik kekuasaan, sistem yang monoton dan 'terpenjarakan', dan berbagai gejala lain yang tidak linear sebagai fungsi pusat kebudayaan.⁵ Gejala ini mewarnai dalam kegiatan pendidikan di sekolah yang tentunya tidak terlepas dari bias globalisasi yang tersekulerkan dan terkapitaliskan, bahkan menjadi 'kering' dari nilai-nilai kebudayaan sebagai sumber kearifan lokal.⁶ Berangkat dari diskursus tersebut di atas, yang menjadi tema sentral tentang sekolah sebagai stimulan pelestarian dan pengembangan budaya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dapat menjadi *elan vital* bagi pusat kebudayaan dan kearifan bangsa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Esensi Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan

² Muhaimin dan Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian filosofis dan kerangka dasaroperasionalnya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993), h. 138.

³ Umar Tirtahardja, et.al., *dasar-dasar Kependidikan*, (Ujung Pandang: Bagian Penerbitan FIP IKIP, 1990), h. 40.

⁴Lihat Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa: Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 6.

⁵Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan...*, h. 27.

⁶ Halik, Abdul. "Paradigma Pendidikan Islam dalam Transformasi Sistem Kepercayaan Tradisional." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 14.2 (2016).

menengah, dan pendidikan tinggi.⁷ Sistematisasi dan jenjang pendidikan diatur sedemikian rupa seperti batasan program kerja dan wilayah kurikulum agar tidak terjadi 'tumpang tindih' dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Pada UU No. 20 Tahun 2003 pasal 17 dikemukakan bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah, sementara pendidikan menengah merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi ialah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.⁸

Pendidikan sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi peserta didik menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat.⁹ Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki karakteristik, yaitu; pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hirarkis, usia peserta didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan, materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum serta adanya penekanan tentang kualitas

pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang.¹⁰

Tugas sekolah secara esensial merupakan sebagai wadah menyiapkan peserta didik untuk dapat eksis dalam kehidupan di masyarakat. Dalam hal ini, sekolah bukan semata-mata sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen dan pemberi jasa yang sangat erat hubungannya dengan pembangunan. Pembangunan tidak akan berjalan dinamis tanpa dukungan dari *output* pendidikan yakni bentuk tersedianya tenaga kerja yang memadai sebagai produk pendidikan. Karena itu, sekolah perlu direncanakan dan dikelola secara baik dan maksimal.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, sekolah disebut sebagai lembaga pendidikan formal sebab sekolah mempunyai bentuk yang jelas, dalam arti memiliki program yang telah direncanakan dengan teratur dan ditetapkan secara resmi; misalnya di sekolah ada rencana pembelajaran, jam pelajaran, dan peraturan lain yang mendeskripsikan bentuk dari program sekolah secara keseluruhan.¹²

Sekolah memiliki program pendidikan yang tersusun secara sistematis, sistem dan kurikulum dirancang sesuai jenjang (tingkat) dan perkembangan peserta didik, tuntutan masyarakat dan sains. Adapun bentuk pendidikan formal mulai tingkat dasar sampai tingkat tinggi adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan tingkat dasar berbentuk sekolah dasar yang disingkat SD dan Madrasah Ibtidaiyah disingkat MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama disingkat SMP dan

⁷ Departemen Agama RI., *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006), h. 6.

⁸Departemen Agama RI., *Undang-undang...*, h. 13-15.

⁹ Halik, Abdul. "DIALEKTIKA FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM (ARGUMENTASI DAN EPISTEMOLOG)." *Istiqra* 1.1 (2017): 1-7.

¹⁰ Lihat Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Ed. Revisi, (Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 46-47.

¹¹Lihat Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 20.

¹²Lihat Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan...*, h. 48.

- Madrasah Tsanawiyah disingkat MTs atau bentuk lain yang sederajat.¹³
- b. Pendidikan tingkat menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan.¹⁴
 - c. Pendidikan tingkat tinggi atau perguruan tinggi berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.¹⁵

Kemudian lembaga pendidikan formal juga dapat dilihat dalam sudut pandang berdasarkan dari yang mengusahakannya dan sifatnya.¹⁶ Berdasarkan dari segi yang mengusahakan terbagi atas dua, yaitu sekolah negeri dan sekolah swasta. Sekolah negeri yaitu sekolah yang diusahakan oleh pemerintah, baik dari segi pengadaan fasilitas, keuangan, maupun pengadaan tenaga pendidik dan kependidikannya. Sedangkan sekolah swasta ialah sekolah yang diusahakan oleh badan-badan swasta bukan oleh pemerintah. Biasanya sekolah ini terdiri atas status disamakan, diakui, terdaftar atau tercatat. Kemudian sekolah menurut sifatnya, terdiri atas dua, yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan lebih cenderung kepada persiapan peserta didik yang berorientasi kepada *technical skill* yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Output sekolah kejuruan dipersiapkan menjadi tenaga kerja yang siap pakai dan juga dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Berbeda dengan sekolah kejuruan, sekolah umum tampak aksentuasinya pada persiapan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi tingkatannya.

¹³Lihat pasal 17. Departemen Agama RI., *Undang-undang...*, h. 13-15.

¹⁴ Pasal 18, Departemen Agama RI., *Undang-undang...*, h. 13-15.

¹⁵ Pasal 20, Departemen Agama RI., *Undang-undang...*, h. 13-15.

¹⁶Lihat Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan...*, h. 52-54.

Dalam batasan lain, lembaga pendidikan formal berfungsi untuk mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan, spesialisasi, efisiensi, sosialisasi, konservasi, dan transmisi kultural, serta transisi dari rumah ke masyarakat.¹⁷ Fungsi-fungsi tersebut, dapat diargumentasikan bahwa di samping bertugas untuk mengembangkan pribadi peserta didik secara menyeluruh, fungsi pendidikan formal yang lebih penting sebenarnya menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan kecerdasan. Fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral. Selanjutnya, di antara ciri semakin meningkatnya kemajuan masyarakat ialah semakin bertambahnya diferensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan lembaga sosial yang melaksanakan tugas tersebut. Untuk itu, sekolah mempunyai tugas spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.

Lembaga pendidikan sekolah merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebagai individu yang dapat menjadi warga negara yang tercerahkan, mampu menjalankan peran positifnya di tengah-tengah masyarakat, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemajuan masyarakat. Peserta didik diharapkan memiliki berbagai pengalaman, ketrampilan, dan kompetensi dalam menghadapi dinamika zaman yang semakin kompleks dan kompetitif. Tentunya agar mampu menghadapi perubahan dan perkembangan dunia yang semakin cepat, berputar dan tidak mengenal berhenti.¹⁸ Sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan

¹⁷Lihat Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan...*, h. 50-52.

¹⁸ Lihat Abdillah Obid dan Yessi HM. Basyaruddin, *Manhaj Pendidikan Anak Muslim*, (Cet. I; Jakarta: Mustaqim, 2004), h. 67.

pembelajaran, maka pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisien dengan analisis, sekiranya tidak ada sekolah dan pekerjaan mendidik harus dipikul oleh keluarga, karena orang tua tidak mampu melaksanakannya karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya serta banyak orang tua tidak mampu melaksanakan pendidikan seperti halnya yang dilakukan oleh tenaga pendidik yang profesional.¹⁹ Pendidikan sekolah dilaksanakan sebagai bentuk kontinuitas pendidikan keluarga, sehingga pendidikan sekolah dan masyarakat harus linear, saling mengisi dan menguatkan.

Dengan demikian, Sekolah sebagai pusat pendidikan adalah sekolah yang mencerminkan masyarakat yang maju karena pemanfaatan secara optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tetap berpijak pada ciri kearifan lokal. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah seyogyanya secara seimbang dan serasi menjamah aspek kebudayaan, penguasaan pengetahuan, dan pemilikan ketrampilan peserta didik.²⁰ Pengembangan secara seimbang, baik aspek kebudayaan, sains, maupun skill merupakan 'embrio' bagi konstruk tatanan sosial yang berkeadaban dan dinamis. Diskursus tersebut trend sekolah dituntut lebih berkualitas dan unggul dalam pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran.

Salah satu ciri sekolah unggul apabila di dalamnya terbangun prototype sekolah efektif.

¹⁹Keterbatasan wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki orang tua, keterbatasan sarana pembelajaran di rumah, serta kemampuan dan kesempatan mendidik orang tua terhadap anaknya sangat terbatas, maka sekolah menjadi alternatif bagi pengembangan potensi dan talenta peserta didik. Lebih jelasnya lihat Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 173.

²⁰Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan...*, h. 173.

Sedangkan kriteria sekolah efektif menurut Sudarwan Danim dapat dilihat sebagai berikut:

1. Membangun standar kerja yang tinggi dan jelas mengenai untuk apa setiap siswa harus mengetahui dan dapat mengerjakan sesuatu.
2. Mendorong aktivitas, pemahaman multibudaya, kesetaraan gender, dan mengembangkan secara tepat pembelajaran menurut standar potensi yang dimiliki oleh para pelajar.
3. Mengharapkan para siswa untuk mengambil peran tanggung jawab dalam belajar dan perilaku dirinya.
4. Mempunyai instrumen evaluasi dan penilaian prestasi belajar siswa yang terkait dengan standar pelajar, menentukan umpan balik yang bermakna untuk siswa, keluarga, staf, dan lingkungan tentang pembelajaran siswa.
5. Menggunakan metode pembelajaran yang berakar pada penelitian pendidikan dan suara praktik profesional.
6. Mengorganisasikan sekolah dan kelas untuk mengkreasi lingkungan yang bersifat memberi dukungan bagi kegiatan pembelajaran.
7. Pembuatan keputusan secara demokratis dan akuntabilitas untuk kesuksesan siswa dan kepuasan pengguna.
8. Menciptakan rasa aman, sifat saling menghargai, dan mengakomodasikan lingkungan secara efektif.
9. Mempunyai harapan yang tinggi kepada semua staf untuk menumbuhkan kemampuan profesional dan meningkatkan keterampilan praktisnya.
10. Secara aktif melibatkan keluarga di dalam membantu siswa untuk mencapai sukses.

11. bekerja sama atau ber-*partner* dengan masyarakat dan pihak-pihak lain untuk mendukung siswa dan keluarganya.²¹

Kriteria sekolah di atas mendeskripsikan sebuah cerminan sekolah yang unggul. Sekolah unggul terlahir karena dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, sehingga dalam proses kependidikan berjalan sesuai tuntutan dan kebutuhan zaman. Berbagai hal yang tampak dalam sekolah unggulan adalah pelayanan akademik yang prima, berbasis teknologi informasi, lingkungan sekolah yang edukatif, terciptanya suasana demokratis dan manajemen partisipatif, hubungan kemitraan dengan masyarakat, dan seterusnya. Kondisi di sekolah tersebut akan memberikan prestasi yang unggul dibanding lembaga sekolah lain.

Model sekolah unggul adalah sesuatu yang ideal, tetapi tidaklah tertutup untuk menuju ke target tersebut. Jerome S. Arcaro dalam Sudarwan Danim, menjelaskan model sekolah yang bermutu, harus ditopang oleh lima pilar, yaitu (1) berfokus pada pengguna; (2) keterlibatan secara total semua anggota; (3) melakukan pengukuran, (4) komitmen pada perubahan; dan (5) penyempurnaan secara terus-menerus.²² Sekolah yang berorientasi pada lima pilar penopang di atas, akan mendorong proses dialektika menuju prestasi yang tinggi. Tahu target yang akan dicapai, pemberdayaan tenaga edikatif secara profesional, pemanfaatan sarana dan prasarana secara maksimal, melakukan evaluasi secara kontiniu, konsisten pada perubahan serta selalu

membenahi sistem, akan melejitkan perubahan yang drastis sesuai dinamika zaman.²³

Sekolah dikonsepsikan untuk mengemban fungsi reproduksi, penyadaran, dan mediasi secara simultan.²⁴ Konsepsi sekolah untuk mengemban fungsi reproduksi, penyadaran, dan mediasi secara simultan. Fungsi-fungsi sekolah itu diwadahi melalui proses pendidikan dan pembelajaran sebagai inti bisnisnya. *Mainstream* sekolah dan dapat menjadi unggul apabila memiliki sistem baik suprastruktur maupun infrastruktur yang memadai. Sebagaimana dalam komponen pendidikan, sekolah unggul, baik dari program pembelajaran, kurikulum, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, pendanaan, hubungan ke masyarakat benar-benar unggul.

Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan di sekolah perlu disertai seperangkat kewajiban, serta monitoring dan tuntutan pertanggungjawaban (akuntabel) yang relatif tinggi, untuk menjamin bahwa sekolah selain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat sekolah. Dengan demikian, sekolah dituntut mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa monopoli, dan bertanggung jawab baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap peserta didik.²⁵

Sekolah sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pendidikan menjadi

²¹Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah: dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 61-62.

²² Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah...*, h. 13.

²³ Hanafie, St Wardah, et al. "Problems of Educators and Students in Learning Islamic Religious Education at MTs Pondok Darren Modern Darul Falah, Enrekang District." *Al-Ulum* 19.2 (2019): 360-386.

²⁴ Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah...*, h. 1.

²⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah-Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Cet.IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 27.

mainstream program-program pembelajaran yang berorientasi pada kualitas dan kepuasan pengguna, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Dengan kata lain, keberhasilan sekolah dapat dilihat dalam panduan manajemen sekolah, mencakup:

- a. Siswa puas dengan layanan sekolah, yaitu dengan pelajaran yang diterima, perlakuan guru, pimpinan, puas dengan fasilitas yang disediakan sekolah atau siswa menikmati situasi sekolah yang baik;
- b. Orang tua siswa merasa puas dengan layanan terhadap anaknya, layanan yang diterimanya dengan laporan tentang perkembangan kemajuan belajar anaknya dan program yang dijalankan sekolah;
- c. Pihak pemakai atau penerima lulusan (perguruan tinggi, industri, masyarakat), puas karena menerima lulusan dengan kualitas tinggi dan sesuai harapan; dan
- d. Guru dan karyawan puas dengan layanan sekolah, dalam bentuk pembagian kerja, hubungan dan komunikasi antar guru/pimpinan, karyawan, gaji/honor yang diterima dan pelayanan lainnya.²⁶

Keempat komponen tersebut harus bersinergis dalam mengembangkan mutu pendidikan di sekolah. Kolaborasi keempat tersebut dapat memicu pelaksanaan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien. Sekolah efektif karena pencapaian hasil yang baik, sedangkan sekolah yang efisien ialah penggunaan sumber daya yang hemat. Untuk mengetahui indikator prestasi pelajar tentunya dilihat dari absensi (kehadiran), tingkah laku di

sekolah, laporan kejahatan/penyimpangan, dan hasil ujian negara. Sekolah yang unggul tersebut adalah sekolah yang efektif dan efisien dengan menjanjikan lulusan yang terbaik, keunggulannya secara kompetitif dan komparatif. Keunggulan kompetitif dimiliki antar lulusan sejenis dalam jurusan yang sama, sedangkan komparatif antar lulusan berbeda dari satu sekolah dengan sekolah lain.²⁷

2. Peranan Sekolah sebagai Pusat Pengembangan Kebudayaan

Di samping tugasnya sebagai pengembangan sains dan teknologi melalui pendidikan dan pembelajaran, sekolah juga berperan dalam pengembangan kebudayaan. Sekolah sebagai lembaga sosial melaksanakan fungsi sosial sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Soleh Soegiyanto mengemukakan fungsi-fungsi sekolah sebagai lembaga sosial, yaitu:

- a. Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, membantu anak-anak dalam mempelajari cara-cara hidup di tempat mereka dilahirkan;
- b. Sekolah berfungsi untuk mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan;
- c. Sekolah berfungsi menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.²⁸

Pada aspek transmisi dan transformasi kebudayaan, sekolah memiliki peranan penting sebagai pusat kegiatan pembelajaran dan riset. Sekolah berperan sebagai *agent of change* dalam segala aspek kehidupan, termasuk kebudayaan. Kegiatan sekolah senantiasa terkait dengan aspek kebudayaan. Eksis dan survive kebudayaan, umumnya karena *backup* oleh sekolah sebagai lembaga sosial dan intelektual.

²⁶Tim Departemen Pendidikan Nasional, *Laporan Nasional Tentang Pembangunan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 2001), h. 43.

²⁷ Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 289.

²⁸ Uyoh Sadullah, dkk., *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 199.

Pendidikan akan mendorong berkembangnya inteligensi dan produk kebudayaan masyarakat.²⁹ Pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, dimana kebudayaan merupakan bagian dari pendidikan dan begitu juga sebaliknya. Pendidikan merupakan usaha manusia untuk memanusiaikan dirinya, yaitu manusia yang berbudaya, kebudayaan itu sendiri dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan melalui pendidikan.³⁰

Urgensi sekolah dalam menjaga kebudayaan sangat tinggi, karena kebudayaan dipahami sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diterima manusia sebagai anggota masyarakat.³¹ Sekolah sebagai pusat kebudayaan merupakan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah.³² Aspek morality, spirituil, intelektuil, dan norma, sebagai komponen penting kebudayaan, harus menjadi aksentuasi sekolah dalam melaksanakan kegiatannya.

Dalam pembangunan budaya nasional perlu diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap kerja keras, disiplin, sikap menghargai prestasi, berani

bersaing, serta mampu menyesuaikan diri dan kreatif. Juga perlu terus ditumbuhkan budaya menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, budaya belajar, ingin maju, dan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Budaya sekolah merupakan perpaduan nilai-nilai, keyakinan, asumsi, pemahaman, dan harapan-harapan yang diyakini oleh warga negara serta dijadikan pedoman bagi perilaku dan pemecahan masalah (internal dan eksternal) yang mereka hadapi. Dengan perkataan lain, budaya sekolah merupakan semangat, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan sekolah, atau pola perilaku serta kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah secara konsisten dalam menyelesaikan masalah.³³

Sekolah hendaknya berperan sebagai masyarakat belajar, yaitu masyarakat yang memiliki tata kehidupan yang mengatur hubungan antara guru dengan lingkungannya yang membelajarkan murid untuk mencapai tujuan pendidikan dalam suasana yang menggairahkan. Sebagai masyarakat belajar, sekolah merupakan pusat nilai-nilai yang disepakati bersama, terpuji, dan dikehendaki, berguna serta perlu dipertaruhkan bagi kehidupan warga, masyarakat dan bangsa yang perlu dibiasakan pada anak didik, dengan cara belajar menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, dan mengamalkannya melalui pembelajaran sekolah.³⁴

Sejalan dengan hal tersebut di atas, misi pendidikan yang berbasis kebudayaan antara lain:

- a. Mengintegrasikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan pendidikan;

³³ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam...*, h. 308.

³⁴ Uyoh Sadulloh, dkk., *Pedagogik (Ilmu Mendidik)...*, h. 200.

²⁹ Belling dan Totten, *Modernisasi dan Masalah Model Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1985), h. 19.

³⁰ Uyoh Sadulloh, dkk., *Pedagogik (Ilmu Mendidik)...*, h. 208.

³¹ Lihat A.L. Kroeber dan Clyde Kluckhohn, *Cultural: A Critical Review of Concept and Definition*, (Massachusset: The Museum, 1952), h. 43.

³² Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, Ed. 1, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 308.

- b. Menjadikan pendidikan sebagai wahana bagi pemasyarakatan nilai-nilai budaya kepada generasi muda;
- c. Mengupayakan terhindarnya peserta didik dari pengaruh budaya global yang negatif;
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai budaya yang mendorong lahirnya etos kerja yang tinggi.³⁵

Misi pendidikan di sekolah tersebut di atas, harus diapresiasi lebih masif sebagai upaya mengembalikan nilai-nilai budaya keindonesiaan yang autentik. Hal tersebut sebagai strategi upaya menangkal arus globalisasi yang berdampak negatif terhadap nilai-nilai luhur dan mentalitas generasi muda. Reduksi nilai budaya lokal dan degradasi mental generasi muda menjadi pekerjaan berat sekolah dalam memulihkan fenomena akut tersebut. Di sinilah momentum sekolah untuk dijadikan *par excellence* sebagai benteng ketahanan nilai kultural masyarakat.

Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang banyak dipengaruhi budaya global yang cenderung rasionalistik, pragmatis, dan sekularistik, tampak muatan pendidikan keseimbangan pada sentuhan kejiwaan seni, dan budi pekerti kurang mendapatkan perhatian yang semestinya.³⁶ Mata pelajaran tentang kesenian, sastra, dan budi pekerti mulia, misalnya, tidak menjadi prioritas utama. Materi pelajaran dan ujian sekolah dan ujian yang diselenggarakan oleh negara misalnya, cenderung menitikberatkan pada bidang ilmu-ilmu rasional dan empiristik. Akibatnya,

kepribadian siswa menjadi tidak utuh, kurang memiliki kelembutan dan kehalusan jiwa. Pendidikan yang dilaksanakan sekarang tampaknya sudah bergeser dari visi kultural kepada visi rasionalistik, pragmatis, hedonistik, dan materialistik. Keadaan ini terjadi sebagai akibat dari adanya pengaruh penjajahan baru dalam bidang kebudayaan (*new colonization in culture*).³⁷

Oleh karena itu, Pembangunan *culture* yang sifatnya kualitatif harus jadi prioritas melalui kegiatan pendidikan di sekolah. Sekolah dituntut melakukan gebrakan dengan pendekatan dan strategi jitu dalam meningkatkan kualitas kultur sebagai sumber kearifan lokal. Namun demikian, tantangan sekolah cukuplah besar, karena pembangunan kualitas kultur yang handal, tidak hanya memerlukan dana, melainkan juga memerlukan keteladanan, bimbingan, pembiasaan, dan pengawasan dari pimpinan, dan didukung oleh seluruh sivitas akademika.³⁸ Deskripsi tersebut sebuah realita bahwa institusi sekolah kontemporer, khususnya di Indonesia memiliki dana yang sangat terbatas dalam menopang agenda besar pembangunan kultur dan karakter anak bangsa, di samping munculnya fenomena degradasi moral dan terbatasnya mutu sumber daya pengelola sekolah dalam memicu pencapaian misi pendidikan di sekolah.

Dalam dataran ini, institusi sekolah perlu direkonstruksi, baik dari segi suprastruktur, infrastruktur, sumber daya, dan sumber dana dalam menjawab problem kontemporer. Sekolah sebagai lembaga formal perlu dikembangkan budaya organisasi yang tepat sesuai visi misinya. Institusi persekolahan disebut memiliki budaya organisasi yang khas

³⁵ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner: Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum*, Ed. 1, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 281.

³⁶ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner...*, h. 285.

³⁷ Lihat Mochtar Buchori, *Pendidikan Antisipatif* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 2001), h. 24.

³⁸ Lihat Djokosantoso Moeliono dan Steve Sudjatmiko, *Corporate Culture Challenge to excellence* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 30.

jika suatu sistem nilai atau makna bersama yang dianut oleh komunitas lainnya. Sistem nilai atau sistem makna adalah seperangkat karakteristik primer dari budaya organisasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Keanggotaan komunitas sekolah yang inovatif dan siap mengambil resiko, setidaknya pada tingkat moderat;
- b. Komunitas sekolah, khususnya kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan pustakawan bertindak secara presisi, atau memiliki ketepatan;
- c. Aksi riil komunitas sekolah, khususnya kepala sekolah dan guru, lebih dominan ketimbang verbalistik;
- d. Fokus kerja kepala sekolah dan guru berorientasi pada hasil, sedangkan teknik, dan proses kerja adalah instrumen;
- e. Berorientasi kepada orang atau komunitas pengguna atau tidak langsung;
- f. Sinergi kerja secara tim;
- g. Keresponsifan dan keagresifan kerja;
- h. Kejegan dan konsistensi kerja;
- i. Keterbacaan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan implementasi;
- j. Akuntabilitas dan sustainabilitas program.³⁹

Pembenahan sistem manajemen dan budaya organisasi institusi sekolah menjadi salah satu strategi pelaksanaan pendidik yang efektif dan efisien. Hal tersebut juga didukung oleh agenda pendidikan dan pembelajaran dalam bentuk kurikulum sekolah. Kurikulum sebagai *term of reference* pelaksanaan pendidikan tentunya berbasis kearifan lokal sesuai semangat cita-cita pembangunan nasional. Murray Print menyatakan bahwa *curriculum is a*

*construct of that culture.*⁴⁰ dengan demikian, kedudukan kebudayaan dalam satu kurikulum sangat penting.⁴¹ Capaian tujuan pendidikan di sekolah tidak bisa dilepaskan dari aspek kebudayaan sebagai basis inspirasi pelaksanaan roda organisasi satuan pendidikan.

Oleh sebab itu, pendidikan di sekolah tidak cukup hanya dipelajari secara ilmiah teoretis dengan sasaran *kecerdasan intelektual* saja. Nilai-nilai hakiki pendidikan di sekolah seharusnya dipelajari secara seksama dengan sasaran *kecerdasan spiritual*, untuk kemudian dikembangkan di dalam keseharian kehidupan bermasyarakat dengan sasaran konkret berupa *kecerdasan emosional*. Koridor inilah menjadi jalan utama pendidikan di sekolah menuju pembudayaan kehidupan manusia.⁴² Kecerdasan intelektual sebagai pengembangan potensi cipta dan kreasi, kecerdasan spiritual sebagai pengembangan potensi rasa, dan kecerdasan emosional sebagai bentuk pengembangan potensi karsa. Ketiga aspek inilah dalam yang menjadi sasaran pendidikan di sekolah, sehingga dapat mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang berbudaya dan beradab.

PENUTUP/SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa:

1. Lembaga pendidikan formal yakni sekolah sebagai kelanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal memiliki aturan yang sistemik, termenej dengan baik, dan dikelola secara profesional. Sekolah

⁴⁰Murray Print, *Curriculum Development and Design*, (St. Leonard: Allen & Unwin Pty, Ltd., 1993), h. 15.

⁴¹ Dikutip dari Ngainum Naim dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2008), h. 194.

⁴²Suparlan Suhartono, *Filsafat Pendidikan...*, h. 31.

³⁹Lihat Sudarwan Danim, *Visi Baru Manajemen Sekolah...*,h. 124.

memiliki fungsi sebagai reproduksi, penyadaran, dan mediasi secara simultan.

2. Sekolah sebagai institusi sosial berfungsi sebagai lembaga sosialisasi, untuk mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan, dan menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Sekolah sebagai pusat kebudayaan merupakan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. pendidikan di sekolah tidak cukup hanya dipelajari secara ilmiah teoretis dengan sasaran *kecerdasan intelektual* saja. Nilai-nilai hakiki pendidikan di sekolah seharusnya dipelajari secara seksama dengan sasaran *kecerdasan spiritual*, untuk kemudian dikembangkan di dalam keseharian kehidupan bermasyarakat dengan sasaran konkret berupa *kecerdasan emosional*. Koridor inilah menjadi jalan utama pendidikan di sekolah menuju pembudayaan kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Belling dan Totten, *Modernisasi dan Masalah Model Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1985)
- Buchori, Mochtar, *Pendidikan Antisipatif*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 2001), h. 24.
- Danim, Sudarwan, *Visi Baru Manajemen Sekolah: dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Das, Siti Wardah Hanafie. "The Character Education of Early Childhood: Brain-Based Teaching Approach." *2018 3rd International Conference on Education, Sports, Arts and Management Engineering (ICESAME 2018)*. Atlantis Press, 2018.
- Das, Sitti Wardah Hanafie, et al. "PENCAPAIAN KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI MELALUI LESSON STUDY DI KOTA PAREPARE." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*. 2017.
- Departemen Agama RI., *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Islam Depag RI, 2006)
- HALIK, Abdul, et al. Paradigm of Islamic Education in the Future: The Integration of Islamic Boarding School and Favorite School. *Information Management and Business Review*, 2016, 8.4: 24-32.
- Halik, Abdul. "DIALEKTIKA FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM (ARGUMENTASI DAN EPISTEMOLOGI)." *Istiqra* 1.1 (2017): 1-7.
- Halik, Abdul. "Paradigma Pendidikan Islam dalam Transformasi Sistem Kepercayaan Tradisional." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 14.2 (2016).
- Hanafie, St Wardah, et al. "Problems of Educators and Students in Learning Islamic Religious Education at MTs Pondok Darren Modern Darul Falah, Enrekang District." *Al-Ulum* 19.2 (2019): 360-386.
- Hanafie, D., and Abdul Hali. "Masalah Putus Sekolah Dan Pengangguran." (2015).
- Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*, Ed. Revisi, (Cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006)
- Ihsan, Fuad, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

- Krober, A.L., dan Clyde Kluckhohn, *Cultural: A Critical Review of Concept and Definition*, (Massachusset: The Museum, 1952)
- Moeljono, Djokosantoso, dan Steve Sudjatmiko, *Corporate Culture Challenge to excellence*, (Jakarta: Gramedia, 2007)
- Muhaimin dan Abdul Mudjib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian pilosopis dan kerangka dasaroperasionalnya* (Bandung: Trigenda Karya, 1993)
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*, Ed. 1, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Cet.IX; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)
- Naim, Ngainum, dan Achmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2008).
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner: Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum*, Ed. 1, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2009)
- Obid, Abdillah, dan Yessi HM. Basyaruddin, *Manhaj Pendidikan Anak Muslim*, (Cet. I; Jakarta: Mustaqim, 2004)
- Print, Murray, *Curriculum Development and Design*, (St. Leonard: Allen & Unwin Pry, Ltd., 1993)
- Sadullah, Uyoh, dkk., *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Suhartono, Suparlan, *Filsafat Pendidikan*, (Cet. IV; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2009)
- Suprijanto, *Pendidikan Orang Dewasa: Dari Teori Hingga Aplikasi*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Cet. I, Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 289.
- Tim Departemen Pendidikan Nasional, *Laporan Nasional Tentang Pembangunan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Depdiknas, 2001)
- Tirtahardja, Umar, dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, Ed. Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Tirtahardja, Umar, et al., *Dasar-dasar Kependidikan*, (Ujung Pandang: Bagian Penerbitan FIP IKIP, 1990)